

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam adalah bahwa kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam antara lain adalah ketidakefisienan dalam pendistribusian, penyalahgunaan dan penimbunan BBM, dampak fiskal negatif pada pemerintah daerah, ketidakadilan dalam alokasi subsidi, dan hambatan terhadap diversifikasi energi.

5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam adalah bahwa implementasi kebijakan subsidi BBM bersubsidi di wilayah ini menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam antara lain adalah

ketidakefisienan dalam pendistribusian, penyalahgunaan dan penimbunan BBM, dampak fiskal negatif pada pemerintah daerah, ketidakadilan dalam alokasi subsidi, dan hambatan terhadap diversifikasi energi.

5.2. Saran

Berikut merupakan saran yang penulis berikan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan antara lain adalah sebagai berikut:

5.2.1 Meningkatkan infrastruktur dan logistik untuk pendistribusian BBM bersubsidi di Kota Batam. Pemerintah harus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya yang mendukung distribusi BBM dari pusat ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik, distribusi BBM subsidi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan merata, sehingga masyarakat yang membutuhkan subsidi dapat memperolehnya dengan lebih mudah.

5.2.2 Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM di Kota Batam. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh tahapan distribusi BBM, mulai dari penyediaan hingga penyaluran ke konsumen, diawasi dengan ketat. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan real-time dapat membantu memantau pergerakan BBM subsidi secara lebih efektif. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait,

termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, dalam proses pemantauan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5.2.3 Mendorong diversifikasi energi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah harus mendukung pengembangan sumber energi alternatif seperti energi terbarukan di Kota Batam. Insentif dan dukungan kebijakan untuk penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM subsidi dan mempercepat transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan kampanye publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi dan penggunaan energi bersih.